



RABU, 06 JUNI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Jaksa Bakal Periksa Mantan Kepala BPBD

Terkait Kasus Dugaan Korupsi DTT

CURUP - Penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong (RL) masih terus mendalami penyidikan dugaan korupsi Dana Tak Terduga (DTT) Sekretariat Kabupaten (Setkab) RL Tahun Anggaran (TA) 2011 yang nilainya mencapai Rp 2,5 miliar. Salah satunya penggunaan DTT yang tidak sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan dan turunannya Perda RL Nomor 05 tahun 2007 tentang penggunaan pengelolaan keuangan daerah.

Tidak hanya pemberian DTT kepada seratus penerima, baik untuk pribadi, kelompok maupun organisasi, termasuk bantuan DTT yang digunakan untuk pembangunan fisik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten RL. Untuk itulah, Penyidik setelah libur lebaran akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang pengelola keuangan di BPBD Kabupaten RL yang menjabat saat itu.

Masing-masing Masdar Helmi selaku Kepala BPBD Kabupaten RL. Lalu Mustafa Lutfi selaku Bendahara BPBD waktu itu dan sekarang masih

menjabat sebagai salah satu kasi di BPBD Kabupaten RL. Serta Afrizal selaku Pengelola Teknis kegiatan yang menggunakan anggaran dari bantuan DTT.

"Mudah-mudahan setelah libur lebaran kita lanjut lagi pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi. Terutama untuk saksi kegiatan fisik di BPBD waktu itu yang menggunakan anggaran bantuan dari DTT. Begitu juga beberapa saksi penerima DTT, baik perorangan maupun kelompok dan organisasi," terang Kajari RL Edi Utama SH, MH melalui Kasi Pidsus Galuh Bastoro Aji, SH, MH kepada RB.

Dirincikan Galuh, khusus untuk DTT yang diberikan kepada BPBD Kabupaten RL diketahui digunakan untuk kegiatan fisik sebanyak 7 item pekerjaan. Masing-masing untuk pemasangan pelapis, penahan, beronjong di Taba Renah-Air Dingin Kecamatan Bermani Ulu Raya (BUR) senilai Rp 92.700.000, Rehap dan Rekon Infrastruktur jalan Taba Renah-Dataran Tapus senilai Rp 90.741.000 dan kegiatan rehap dan rekon infrastruktur jalan Soponyono senilai Rp 59.091.000.

Kemudian, sambung Galuh, untuk kegiatan Rehap Rekon Infrastruktur Jalan Sapta Marga senilai Rp 227.273.000 dan kegiatan rehap rekon

infrastruktur Jalan Beringin 3 senilai Rp 152.436.000. Serta kegiatan rehap rekon infrastruktur irigasi Air Tik TA-Simpang Macang senilai Rp 72.727.000 dan rehap rekon infrastruktur irigasi Air Putih-Kali Bandung senilai Rp 74.547.000.

"Kalau seluruh saksi sudah selesai kita periksa, langsung kita lanjutkan pemeriksaan seluruh fisik bangunan yang menggunakan anggaran DTT tersebut. Target kita, setidaknya Juli 2018 mendatang sudah ada hasil PKN (perhitungan kerugian negara, red) dan dilanjutkan dengan penetapan tersangka," imbuh Galuh.

Untuk diketahui, DTT TA 2011, dalam APBD nilainya mencapai Rp 3 miliar dan mengalami pengurangan pada APBD Perubahan TA 2011 atau menjadi Rp 2,5 miliar. Diakhir TA 2011 atau saat tutup buku, diketahui anggaran tersebut terserap hingga Rp 2,3 miliar. Namun dari hasil temuan BPK RI atas hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah di RL tahun 2011, diduga Rp 1,474 miliar dari realisasi tidak sesuai ketentuan. (dtk)